



# Satu Referensi Peta Geospasial

Oleh : Achmad Poernomo, Budi Sulistiyo, Widodo S. Pranowo

**Balitbang KP ikut  
menyukseskan kebijakan *one  
map policy* dengan melakukan  
penyusunan basis data sumber  
daya laut dan pesisir**

**K**ebijakan *one map policy* yang telah didengungkan sejak 2012 mulai bisa menyatukan kementerian/ lembaga terkait untuk dapat bekerja secara bersama-sama. Salahsatunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melalui Balitbang KP (Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan) berhasil menerbitkan Peta Sebaran Terumbu Karang Nasional oleh Pokja Pemetaan Sumber Daya Pesisir pada 2013. Disusul kemudian dengan Peta Karakteristik Laut Nasional dan Peta Habitat Lamun Nasional.

Peta-peta tersebut merupakan langkah awal yang nyata dan akan ditindaklanjuti dengan pembaruan-pembaruan data dan informasi. Balitbang KP secara aktif rutin di setiap tahun melakukan survei laut, pengukuran parameter oseanografi pesisir, dan akuisisi data deret waktu karakteristik massa air laut.

Selain itu peramalan pola arus dan suhu laut untuk periode 5 - 10 hari kedepan telah rutin dilakukan sejak awal 2014. Kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan pada kurun waktu 2015 - 2019 dalam rangka dukungan terhadap pencapaian IKU (Indikator Kerja Utama) KKP untuk fungsi lingkungan.

## **One Map Policy**

*One map policy* memiliki misi mengintegrasikan seluruh data tematik nasional dengan melihat kendala ketersediaan dan keseragaman data selama ini di Indonesia. Balitbang KP mengirimkan wakilnya untuk duduk dalam Pokja Pemetaan Sumberdaya

Peta Karakteristik Laut Nasional



Peta Habitat Lamun Nasional



Pesisir Laut dengan Sub Pokja (Kelompok Kerja) Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Pulau-pulau Kecil dan Liputan Dasar Laut.

Anggota Pokja dari kementerian/ lembaga terkait lainnya yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG), Dinas hidro Oseanografi (Dishidros-TNI AL), Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Pusat Penelitian Oseanologi (P2O-LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL-ESDM), LAPAN, BPN,

BPPT, Kemendagri, Kemenhut, BPS, Kemenhan, UNDIP, IPB, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), UGM, unsoed, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove, dan Wetland International.

Tujuan dengan adanya satu peta gerakan pembangunan informasi geospasial secara partisipatif dan kolaborasi untuk menuju satu referensi peta (*one reference*), satu standar peta (*one standard*), satu basis data peta (*one database*), serta satu portal peta (*one geoportal*). Dengan adanya satu



Kepala Balitbang KP Achmad Poernomo menandatangani Peta Karakteristik Perairan Nasional dan Peta Lamun Nasional

referensi peta diharapkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dibuat dengan mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD) sesuai dengan Undang-Undang nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial. Dengan demikian sehingga data memiliki sistem koordinat yang sama serta memungkinkan beberapa data dapat diintegrasikan.

Apabila ada satu standar peta maka secara nasional hanya akan terdapat satu standar pemetaan IGT yang telah disepakati antar *stakeholder*. Standar ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemetaan, dengan tujuan kesatuan dalam metode pemetaan, pemetaan dapat dilakukan pihak manapun serta efisiensi penyelenggaraan pemetaan.

Dengan adanya satu basis data maka diharapkan terdapat satu basis data IGT yang besar, canggih, dan terjamin tingkat keamanannya. Basis data ini dibangun dan digunakan secara bersama antar *stakeholder* dengan tujuan untuk menghindari duplikasi serta menjaga konsistensi data. Sedangkan dengan adanya satu portal peta maka diharapkan terdapat suatu sistem aplikasi (biasanya berbasis internet) untuk menampilkan dan menyebarkan data ke pengguna. Tujuannya untuk mempermudah akses pengguna, mengintegrasikan data spasial serta menjadi acuan resmi.

## Peluncuran One Map

Terkait pentingnya One Map untuk keseragaman data secara Nasional, maka pada Senin, 22 Desember 2014 bertempat di RR. UtAMA Blok I Lantai 4 Gedung Mangala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berlangsung acara Peluncuran Satu Peta (IGT) yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Acara tersebut dihadiri dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan wakil dari beberapa kementerian

yang terlibat didalam penyusunan Peta IGT.

Terdapat 4 peta IGT yang diresmikan yakni peta kesesuaian lahan nasional, peta karakteristik perairan nasional, peta lamun nasional, dan peta mangrove nasional.

Kementerian yang hadir antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Lembaga-lembaga pemerintah Non-Kementerian, dan juga perwakilan dari pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal KKP Syarif Widjaja hadir mewakili Men KP dan turut menandatangani peta mangrove nasional. Hadir pula Kepala Balitbang KP Dr. Achmad Purnomo yang menandatangani 2 peta yaitu peta karakteristik perairan nasional, dan peta lamun nasional.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Budi Sulistiyo yang juga hadir menyampaikan filosofi dan proses teknis penyusunan kedua peta tematik IGT yang pada 2013 telah berhasil menyusun peta terumbu karang nasional oleh Pokja. Kemudian hadir pula Kepala Pusat Oseanografi LIPI Zainal Arifin dan Anggota Pokja Informasi Geospasial Tematik (IGT). Diharapkan dengan peresmian *One Map* akan memancing institusi lainnya baik di pusat maupun daerah untuk ikut berkontribusi memperbaiki basis data peta IGT.

## Dukungan dan Kendala

Untuk mendukung *one map policy*, maka



Peluncuran One Map dihadiri Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga-lembaga pemerintah Non Kementerian dan dari Pemerintah Daerah

# BALITBANG KP

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan  
www.balitbang.kkp.go.id

setiap Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mempunyai peran dan kontribusi yang sangat penting. Peran tersebut diantaranya melakukan pemetaan IGT yang mengacu ke IGD, *sharing* (berbagi) data untuk penyusunan peta dasar, terlibat aktif dalam kelompok kerja (K/L), menyelaraskan pemetaan dan pengelolaan data sesuai standar yang disepakati, terlibat aktif dalam kelompok kerja (K/L), memperbarui data di *one map*, serta menyediakan data *mirror* untuk *back up*.



Hal lain yang dilakukan KKP adalah dengan pembangunan *web GIS* yang menjadi bagian dari Ina-Geoportal yang *mirroring* dengan Wali-data di kementerian/lembaga terkait yang tergabung dalam Pokja Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, serta menggunakan alternatif aplikasi yang gratis dan open Source untuk mengurangi biaya.

Namun kendala dari aplikasi gratis adalah *updating* aplikasi tidak terjamin keberlanjutannya karena dibangun secara sukarela. Selain itu tingkat keamanan juga masih menjadi hal yang dipertanyakan, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi keberlanjutan program nasional *one map*.

Trobos Aqua/Adv